

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN II TAHUN 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 1.1 Latar Belakang..... 4

 1.2 Tujuan dan Manfaat 4

 1.3 Metode Pengumpulan Data 5

 1.4 Waktu Pelaksanaan SKM 6

 1.5 Penentuan Jumlah Responden..... 6

BAB II ANALISIS DATA SKM..... 7

 2.1 Analisis Responden..... 7

 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan 8

 2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut..... 9

 2.4 Tren Nilai SKM 11

BAB III HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA..... 13

BAB IV KESIMPULAN..... 16

LAMPIRAN 17

 1. Kuesioner..... 17

 2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM) 19

 3. Lampiran Dokumentasi Kegiatan pada Realisasi Rencana Tindak Lanjut21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data 5

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM 6

Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden..... 6

Tabel 2.1 Analisis Responden 7

Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan 8

Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut 11

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)..... 13

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

- Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:
 - Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;

- Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
- Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
- Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan pada karakteristik setiap layanan untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode secara online demi menjangkau seluruh segmen pengguna layanan secara efektif. Rincian metode survei yang digunakan untuk setiap jenis layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data

No	Jenis Layanan	Metode Survei
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	online
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR , dan KKPR	online

Instrumen survei yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

- Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk alur pengaduan.
- Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenisnya.
- Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Perilaku Pelaksana: Sikap dan tindakan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
- Sarana dan Prasarana: Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dilakukan secara periodik sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Periode pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan selama TRIWULAN II TAHUN 2026 (2026). Keseluruhan proses, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, memerlukan waktu selama 2 bulan. Rincian tahapan dan alokasi waktu kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	01 Apr 2026 - 03 Apr 2026	3
2	Pengumpulan Data	06 Apr 2026 - 19 Jun 2026	75
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	22 Jun 2026 - 24 Jun 2026	3
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	25 Jun 2026 - 30 Jun 2026	6

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden untuk setiap jenis layanan didasarkan pada populasi masing-masing. Untuk memastikan sampel yang diambil bersifat representatif, jumlah minimum responden ditetapkan menggunakan metode yang mengacu pada Tabel Krejcie dan Morgan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap layanan memiliki jumlah responden yang memadai secara statistik untuk menghasilkan data yang akurat. Rincian populasi dan target sampel minimum untuk setiap layanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Penentuan Jumlah Responden

No	Jenis Layanan	Jumlah Populasi	Sampel Minimum
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	20	19
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR , dan KKPR	20	19
Total		40	38

BAB II
ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Analisis terhadap karakteristik responden bertujuan untuk memahami latar belakang dan profil dari para pengguna layanan. Pada periode survei ini, data berhasil dikumpulkan dari total 88 responden. Profil demografis responden, yang mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Responden

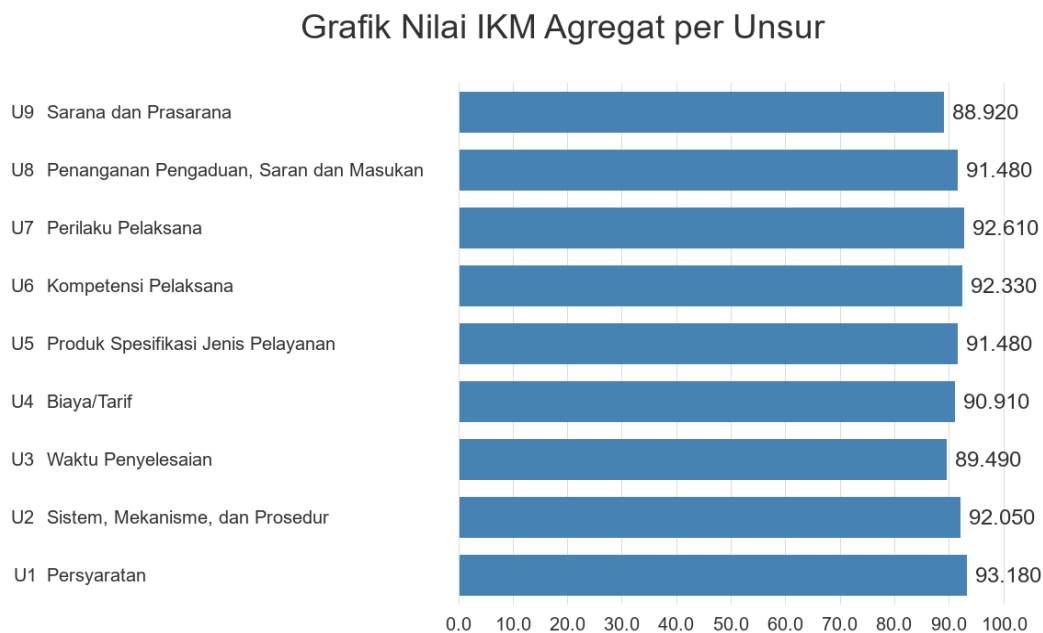
No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	50	56.82%
		Perempuan	38	43.18%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	17	19.32%
		D1/D2/D3	10	11.36%
		D4/S1	46	52.27%
		S2	14	15.91%
		S3	1	1.14%
3.	Pekerjaan	ASN	26	29.55%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	37	42.05%
		Wirausaha	9	10.23%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	5	5.68%
		Petani/Nelayan	1	1.14%
		Pekerja Lepas/Freelance	3	3.41%
		Pensiunan	1	1.14%
		Lainnya	6	6.82%
		Perangkat Desa	0	0%
4.	Kategori Pengguna Layanan	Non Disabilitas	88	100%
		Disabilitas	0	0%
5.	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Setelah menganalisis profil responden, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terperinci. Tabel berikut ini menguraikan capaian nilai IKM untuk setiap jenis layanan yang disurvei, beserta rincian nilai rata-rata untuk masing-masing dari sembilan unsur pelayanan.

Tabel 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1	Layanan Konsultasi PBG/SLF	32	94.53	93.75	87.50	93.75	92.97	90.63	92.97	90.63	86.72	91.53
2	Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR , dan KKPR	56	92.41	91.07	90.63	89.29	90.63	93.30	92.41	91.96	90.18	91.36
Rerata IKM Per Unsur			93.18	92.05	89.49	90.91	91.48	92.33	92.61	91.48	88.92	91.42
IKM Unit Layanan			91.42									
Mutu Unit Layanan			Sangat Baik (A)									



Gambar 2.1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis data SKM, dapat diidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara kuantitatif, unsur-unsur dengan nilai terendah adalah: Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif.

Temuan ini sejalan dengan analisis kualitatif dari kritik dan saran yang diterima, dimana beberapa tema utama yang sering disorot oleh masyarakat antara lain:

- Pelayanan baik
- Sudah Bagus
- Pelayanan ramah, menjelaskan dengan baik
- Alur pengajuan yang disampaikan jelas
- Sudah bagus, konsultasi pada CS agar lebih ditingkatkan lagi
- Pelayanan ramah, verifikasi berkas supaya ditingkatkan sesuai SOP
- Ruang pelayanan AC tidak hidup, pemohon kurang nyaman
- Pelayanan dikantor cukup bagus
- Sudah bagus dalam pelayanan
- Ditingkatkan saja
- Pelayanan sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan
- Pelayanan ditambah meja supaya lebih mempermudah dan memperlancar
- Sudah baik
- Selalu memberikan pelayanan yang terbaik lagi
- Tambah sukses ke depan dan akses nya

- Baik dan cepat
- Pelayanan baik
- Pelayanan sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan
- Sudah baik, pertahankan
- Pelayanan bagus cepat tanggap, komunikatif, ditingkatkan dan dipertahankan
- Mohon ditingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat, semoga ke depannya DPUPR kab. Sukoharjo selalu yang terbaik
- Sangat memuaskan
- Sangat baik, transparan, dan memuaskan
- Sudah bagus pelayanannya, masukannya ditambah AC agar lbh nyaman
- Sudah sangat baik dan memuaskan
- Layanan bagus petugas ramah
- Sangat memuaskan
- Semua dijelaskan dengan baik dan mudah dipahami
- Pertahankan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah
- Pelayanan sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan
- Pertahankan/tingkatkan pelayanan
- Semua sudah sesuai dengan motto nya
- Sangat membantu, pelayanan cepat
- Penjelasan dapat dipahami
- Sangat baik pelayan nya
- Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya dan tetap melayani dengan tulus dan baik. Terima kasih Pak Gunadi.
- InsyaAllah sudah cukup jelas
- Layanan baik
- Nice bagus prima
- Baik. Ada Playground jadi anak tidak rewel selama menunggu
- Sangat bagus. Semakin di sosialisasikan di medsos bahwa ada MPP yang bagus nyaman adem dan solutif
- Penjelasan dari petugasnya mudah dipahami dan penuh antusias
- Pelayanan sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan
- Yang sudah berjalan baik lebih ditingkatkan lagi pelayanan kepada Masyarakat
- Pelayanan sangat memuaskan
- Pertahankan pelayanan
- Pelayanan bagus dan lanjutkan

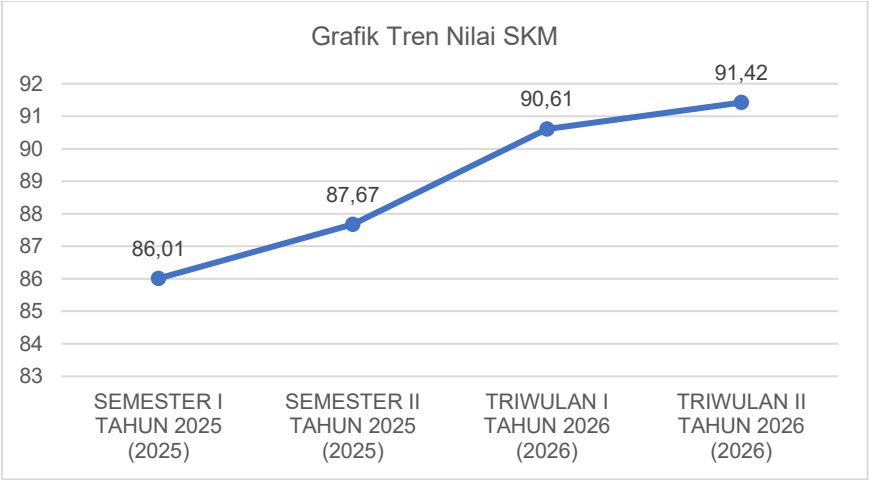
Atas dasar temuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai IKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan adalah pada unsur-unsur yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut adalah rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang:

Tabel 2.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan publik	Desember 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Waktu Penyelesaian	Mengoptimalkan Sistem Informasi Tata Ruang dan Pengadaan Klinik Konsultasi PBG/SLF dan KKPR	Juli 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Biaya/Tarif	Transparansi Informasi kepada masyarakat bahwa pelayanan publik gratis	Desember 2026	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama beberapa periode terakhir dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Grafik ini menggabungkan data historis yang diarsipkan dengan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memberikan gambaran yang komprehensif.



Gambar 2.2. Grafik Tren Nilai SKM

Berdasarkan grafik di atas, tren nilai SKM menunjukkan tren peningkatan yang positif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan, seperti dapat terlihat pada ringkasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	91.02
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92.97
3	Waktu Penyelesaian	89.84
4	Biaya/Tarif	91.41
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90.23
6	Kompetensi Pelaksana	89.06
7	Perilaku Pelaksana	93.36
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	89.45
9	Sarana dan Prasarana	87.89

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyusun dan menindaklanjuti rencana perbaikan berdasarkan temuan pada periode tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan publik	Belum	Deskripsi: melakukan diskusi dengan bagian pengadaan OPD, terkait aduan mengenai sarana dan prasarana yg ada pada pelayanan. Hambatan: anggaran yang belum ada untuk cover terkait aduan mengenai sarpras.	Tidak ada
2	Kompetensi Pelaksana	Mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, seminar (zoom meeting) berkaitan dengan Peraturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Sudah	Deskripsi: Mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, Koordinasi, dan Zoom Meeting terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi Hambatan: Adanya aturan-aturan baru yang perlu disesuaikan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait aturan-aturan baru tersebut	Terlampir
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mengoptimalkan penanganan pengaduan, saran,	Sudah	Deskripsi: Adanya nomor aduan/pelayanan guna menjawab permasalahan untuk Pengaduan,	Terlampir

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
		dan masukan yang sudah ada		Saran dan Masukan untuk pelayanan tata ruang dan pelayanan PBG/SLF Hambatan: Permasalahan sistem yang eror untuk memproses pelayanan seperti pelayanan KKPR sehingga diperlukan koordinasi dengan dinas lainnya (DPMPTSP) guna perbaikan layanan tersebut	

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode April s.d. Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 88 orang mengisi SKM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari beberapa layanan yang ada, Layanan Informasi Tata Ruang, SKKTR, dan KKPR menjadi layanan dengan pengguna terbanyak, terlihat dari jumlah responden yang mengisi survei yaitu 56 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas Sangat Baik (A) dengan nilai SKM 91.42. Meskipun demikian, nilai SKM menunjukkan pola yang stabil.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 67% (2 dari 3 rencana).
- Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti, yaitu: Pengadaan sarana dan prasarana mendukung pelayanan publik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Bowo Sutopo D.A, ST.,MT
Pambina Utama Muda
NIP. 19690912 199803 1 007

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. IDENTITAS RESPONDEN			
Jenis Layanan:			
Tanggal Menerima Layanan:			
Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan			
Pendidikan: ☐ Tidak Sekolah ☐ SD/Sederajat ☐ SMP/Sederajat ☐ SMA/Sederajat ☐ D1/D2/D3 ☐ D4/S1 ☐ S2 ☐ S3		Usia: ☐ < 17 tahun ☐ 17-25 tahun ☐ 26-34 tahun ☐ 35-44 tahun ☐ 45-54 tahun ☐ 55-65 tahun ☐ >65 tahun	
Pekerjaan: ☐ ASN ☐ TNI ☐ POLRI	☐ Swasta ☐ Wirausaha ☐ Ibu Rumah Tangga	☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Petani/Nelayan ☐ Pekerja Lepas/Freelance	☐ Pensiunan ☐ Lainnya _____
Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? ☐ Ya ☐ Tidak			
Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)			
☐ Disabilitas Fisik ☐ Disabilitas Intelektual		☐ Disabilitas Mental ☐ Disabilitas Sensorik	

A. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN	
1. Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	6. Petugas merespon kebutuhan dengan cepat a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
2. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	7. Petugas melayani saya dengan ramah a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
3. Layanan yang diberikan sudah tepat waktu a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	8. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
4. Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	9. Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju
5. Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan a. Sangat tidak setuju b. Tidak setuju c. Setuju d. Sangat setuju	

Kritik dan Saran:

2. Dokumentasi terkait Pelaksanaan SKM (Foto Pelaksanaan SKM)





3. Lampiran Dokumentasi Kegiatan pada Realisasi Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, seminar (zoom meeting) berkaitan dengan Peraturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

1) Mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi PBG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



2) Mengikuti Bimtek/Rapat Koordinasi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Se-Subosukowonosraten guna berbagi atau sharing permasalahan penataan ruang yang di wilayah



3) FGD Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2026



- Mengoptimalkan penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang sudah ada



CS SIMBG Sukoharjo

+62 878-1537-8823

Organisasi Pemerintah

Layanan konsultasi dan informasi SIMBG Kabupaten Sukoharjo tersedia melalui chat. Melayani konsultasi, informasi, dan pendampingan perizinan PBG dan SLF. Untuk layanan melalui telepon, dapat menghubungi nomor berikut (0271)593013

Buka

07.30 - 13.30 ▼

Jl. Rajawali No.8, Mojotegalan, Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57513, Indonesia



pbgr.dpuprskh@gmail.com

<https://linktr.ee/SAHABATPBG>

<https://simbg.pu.go.id>



Informasi

Bidang Tata Ruang

 **0851 9621 2408**

(WA Only)

Jam Pelayanan

Senin - Kamis 07.00 - 15.30

Jum'at 07.00 - 14.00



Pelayanan

Konsultasi Tata Ruang

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Tata Ruang